# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sejarah kehidupan umat manusia senantiasa diisi oleh berbagai dinamika isu-isu keamanan, baik itu sebagai sebuah isu yang mengancam bagi seorang individu maupun kelompok. Konflik dan peperangan sudah menjadi hal biasa terjadi dalam perjalan kehidupan umat manusia. Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, kemampuan berperang suatu kelompok manusia turut mengalami peningkatan yang berpotensi mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar. Dunia pernah mengalami sebuah era yang disebut dengan Era Perang Dingin. Era tersebut terlahir sebagai konsekuensi dari Perang Dunia II yang menimbulkan sebuah situasi dimana para pemenang perang berusaha untuk memperluas kekuatan dan pengaruhnya dalam skala global.

Di Era Perang Dingin, konflik yang terjadi antara kekuatan global di dunia, tidak terjadi dengan konfrontasi secara langsung (*direct confrontation)* melalui perang konvensional. Adanya program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan secara masif oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai kekuatan adidaya dunia, membuat kedua negara menjadi enggan dan takut untuk melakukan konfrontasi secara langsung dengan pertimbangan dampak kerusakan besar yang dapat terjadi apabila kedua negara menggunakan seluruh persenjataan nuklir yang dimiliki (*Nuclear Holocaust)*[[1]](#footnote-1). Oleh karenanya, kedua negara adidaya tersebut menggunakan sebuah metode yang dinamakan Perang Proxy (*Proxy War).* Perang Proxy merupakan “sebuah metode konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal”[[2]](#footnote-2). Dengan kata lain, sebuah perang proxy terjadi ketika kekuatan besar menghasut atau memainkan peran utama dalam mendukung dan mengarahkan pihak ke konflik tetapi hanya terlibat secara langsung dalam skala yang kecil dalam pertempuran itu sendiri[[3]](#footnote-3).

Di Era Pasca Perang Dingin, apabila ditinjau dari jenis konflik yang terjadi, berdasarkan data dari *Uppsala Conflict Data Program* (UCDP), terjadi penurunan jumlah konflik intranegara yang terjadi di dunia pasca Perang Dingin antara tahun 1991-2019, dimana terdapat 49 konflik intranegara (1991), berubah menjadi 30 konflik saja (2019)[[4]](#footnote-4). Selain itu, konflik internegara sudah jarang terjadi dan dalam kurun waktu yang sama, konflik internegara tidak pernah berjumlah lebih dari 2 per-tahunnya. Namun, meskipun secara umum konflik intranegara mengalami penurunan jumlah pasca Perang Dingin, terjadi peningkatan secara drastis dalam jenis konflik intranegara yang melibatkan kekuatan pihak asing. Ditahun 1991 hanya terdapat 2 konflik di dunia yang memenuhi kategori tersebut dan berubah menjadi 22 konflik per-tahun 2019. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013-2015 dengan jumlah sebanyak 12 konflik[[5]](#footnote-5). Hal ini menunjukkan meskipun Perang Dingin telah berakhir, metode penggunaan *Proxy War* maupun intervensi asing dalam suatu konflik masih sering terjadi di dunia. Salah satu konflik intranegara yang menjadi tempat bertempurnya pihak-pihak asing melalui *Proxy War* ialah Libya. Setidaknya terdapat 2 periode konflik intranegara atau internal di Libya, Konflik Internal Libya I (2011) antara rezim Jamahiriyah Moammar Gaddafi menghadapi pemberontak, dan Konflik Internal Libya II (2014-2020) pasca rezim Moammar Gaddafi antara pemerintahan *Government of National Accord* (GNA) di Tripoli dengan pemerintahan *House of Representative* (HoR) di Tobruk yang didukung oleh Jendral Khalifa Haftar dan *Libyan National Army* (LNA).

Seperti mayoritas negara Afrika Utara pada saat itu, Libya turut mengalami dampak dari gelombang demonstrasi *Arab Spring* yang menuntut pemerintahan negara-negara Arab pada saat itu untuk menjadi lebih demokratis pada awal tahun 2010-an. Akibatnya pada tanggal 15 Februari 2011, terjadi demonstrasi anti-pemerintah yang diadakan di Benghazi oleh pengunjuk rasa yang marah dengan penangkapan seorang pengacara pro-hak asasi manusia, Fethi Tarbel. Para demonstran menyerukan agar Qaddafi mundur dan para tahanan politik dibebaskan. Namun, pasukan keamanan Libya membalas dengan menggunakan *water canon* dan peluru karet terhadap demonstran yang mengakibatkan beberapa diantara mereka mengalami cedera[[6]](#footnote-6).

Ketika protes gelombang demonstrasi semakin meningkat hingga para demonstran mampu menguasai Benghazi dan kerusuhan menyebar ke hingga Tripoli, pemerintah Libya mulai menggunakan cara-cara kekerasan terhadap demonstran. Bahkan pada tanggal 24 Februari, Qaddafi mengecam para demonstran, dengan mengatakan bahwa orang-orang muda yang menjadi inti dari gerakan protes tersebut bertindak di bawah pengaruh obat-obatan halusinogen dan bahwa demonstrasi tersebut dikendalikan oleh al-Qaeda. Aksi kekerasan yang semakin meningkat berubah menjadi Perang Saudara antara pasukan loyalis pro-Qaddafi (*Libyan Arab Jamahriyah)* melawan pasukan pemberontak yang menamakan diri sebagai *National Transitional Council* (NTC) dan memulai terjadinya Konflik Internal Libya I.

Melihat semakin meningkatnya jumlah aksi kekerasan yang terjadi, dunia internasional menekan agar Qaddafi mundur dari kursi kekuasaannya. Bahkan, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan *United Nations Security Council Resolution 1973 (2011)* yang menyetujui tindakan termasuk menjatuhkan sanksi terhadap rezim Qaddafi, memberlakukan larangan perjalanan dan embargo senjata, dan pembekuan aset keluarga Qaddafi. Resolusi tersebut kemudian dijadikan landasan legalitas untuk melakukan intervensi kemanusiaan oleh pasukan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) sebagai upaya untuk menetapkan gencatan senjata dan penghentian segala aksi kekerasan maupun serangan terhadap warga sipil[[7]](#footnote-7). Secara perlahan, Gaddafi mulai kehilangan kekuasaan setelah pasukan pemberontak berhasil merebut kota Tripoli yang merupakan basis utama kekuatannya. Puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2011, Gaddafi berhasil ditangkap oleh pasukan NTC di bagian barat kota Sirte setelah konvoi kendaraannya diserang oleh pesawat tempur NATO[[8]](#footnote-8). Ia dibunuh tidak lama setelah dilakukan penangkapan, dan pemerintahan *de facto* Libya dipegang oleh pemerintahan NTC yang menandai berakhirnya Perang Saudara Libya I di tahun itu.

Pasca terbunuhnya Gaddafi, Libya secara bertahap bertransformasi menjadi negara demokratis dan mengadakan pemilu pertama pada Juli 2012, serta mendirikan pemerintahan *General National Congress* (GNC) yang menggantikan NTC secara formal pada tanggal 8 Agustus 2012. Namun, di tahun 2014, gejolak politik kembali terjadi di Libya ketika faksi islam dalam pemerintahan GNC yang awalnya menerima hasil pemilu 2014, mengubah pandangannya dan menolak hasil pemilu yang diadakan untuk memilih anggota pemerintahan *House of Representative* (HoR), pemilihan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengganti pemerintahan GNC yang gagal merumuskan dan mengimplementasikan dasar konstitusi negara sesuai dengan mandat 2 tahun yang telah diberikan. Penolakan itu didasari karena kecilnya jumlah pemilih yang menunaikan hak pilihnya. Dari 1.5 juta orang yang mendaftarkan diri sebagai pemilih, hanya ada sekitar 630 ribu orang saja yang menggunakan hak pilihnya. Hal itu disebabkan oleh masih banyaknya aksi kekerasan di Libya yang dilakukan oleh milisi-milisi yang tidak loyal terhadap pemerintahan pasca-Gaddafi[[9]](#footnote-9). Selain itu, hasil pemilu yang cenderung menguntungkan faksi sekuler karena berhasil memperoleh jumlah kursi mayoritas, sementara faksi islam hanya memperoleh 30 dari 200 kursi[[10]](#footnote-10).

Pertentangan itu memecah politik Libya ke dalam 2 kubu pemerintahan yang saling mengklaim sebagai pemerintahan sah, antara pihak faksi islamis yang menginginkan agar pemerintahan GNC lama tetap berdiri, menghadapi kubu pemegang mayoritas kursi pemerintahan HoR yang bermayoritaskan faksi sekuler. Pemerintahan HoR enggan menjabat dari kota Tripoli yang merupakan basis utama faksi islam. Oleh karenanya, pemerintahan HoR melarikan diri dari Tripoli ke dalam perlindungan Jendral Khalifa Haftar dan *Libyan National Army* (LNA), serta mendirikan pemerintahan sendiri di Tobruk dan wilayah timur Libya sebagai basis kekuatannya[[11]](#footnote-11).

Wilayah Tobruk menjadi basis kekuatan Haftar setelah aksi penyerbuan yang ia lakukan terhadap milisi islamis pada 16 Mei 2014 yang dijustifikasi oleh Haftar sebagai aksi untuk memberantas kelompok teroris, walaupun hal itu dibantah dan dianggap sebagai aksi kudeta oleh Perdana Menteri Libya Abdullah al-Thinni[[12]](#footnote-12). Akibat dari pertentangan tersebut, peta perpolitikan Libya terbelah menjadi 2 antara faksi islam yang menginginkan pemerintahan GNC lama tetap berdiri di kota Tripoli, wilayah barat Libya, dengan pemerintahan terpilitih HoR yang memiliki basis kekuatan di Tobruk, wilayah timur Libya yang menandakan dimulainya Konflik Internal Libya II.

Upaya penyelesaian konflik sempat dilakukan pada 17 Desember 2015, PBB menginisiasikan suatu pertemuan untuk menghentikan segala aksi kekerasan yang terjadi di Libya dalam *Libyan Political Agreement* di kota Skhirat, Maroko antara pihak yang mengingkan pemerintahan GNC yang dulu untuk tetap berdiri dengan pihak HoR. Pertemuan itu menghasilkan pembentukan pemerintahan sementara baru yang disebut *Governement of National Accord* (GNA) dan memilih Fayez Al-Sarraj sebagai Perdana Menteri pada Maret 2016. Namun, perjanjian tersebut gagal terimplementasikan secara penuh karena pada kenyatannya, pemerintahan HoR tetap beridiri di Tobruk karena ketidaksetujuan mengenai beberapa isi perjanjian[[13]](#footnote-13). Di tahun 2016, upaya untuk mencapai perdamaian di Libya kembali dilakukan dalam Konferensi Palermo di Italia yang dihadiri oleh Perdana Menteri Fayez Al-Sarraj, Jendral Khalifa Haftar, dan delegasi dari 36 negara lain termasuk Rusia, Perancis, Amerika Serikat, Mesir, dan Turki[[14]](#footnote-14). Namun, pertemuan tersebut gagal memberikan hasil berarti bagi upaya menstabilkan kondisi perpolitikan Libya akibat penyelengaraan konferensi yang terkesan kacau dan tidak terorganisir dengan baik[[15]](#footnote-15).

Selama jalannya konflik, hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam peta kekuasaan wilayah pihak yang berkonflik. Namun, eskalasi konflik terjadi secara signifikan pada bulan April 2019, ketika Haftar beserta pasukan LNA melakukan operasi militer besar yang bertujuan untuk merebut kota Tripoli dan seluruh wilayah barat Libya dari Pemerintah GNA. Haftar mengatakan bahwa serangan itu ditujukan untuk "membersihkan wilayah barat Libya dari kelompok teroris"[[16]](#footnote-16). Haftar berhasil menaklukan wilayah-wilayah pertahanan GNA dengan cepat dan pada tanggal 5 April. Kota kecil seperti Qasr bin Ghashir, Wadi al-Rabie andSuq al-Khamis yang berada dalam distrik terluar Tripoli, berhasil dikuasai dan secara efektif mampu mengepung kota Tripoli.

Pasukan Haftar tidaklah bertempur sendirian, melainkan dibantu oleh Rusia, Uni Emirat Arab (UAE), dan Mesir yang memberikan bantuan peralatan tempur. Ofensif tersebut berhasil menghancurkan kekuatan militer GNA dan mengakibatkan sebagian besar wilayah barat Libya berhasil dikuasai oleh Haftar, selain itu kota Tripoli turut berada dalam kepungan pasukan Haftar selama berbulan-bulan. Keadaan terdesak tersebut membuat pemerintahan GNA mengumumkan permintaan bantuan militer pada akhir tahun 2019 yang kemudian diterima oleh Turki[[17]](#footnote-17). Kedua pihak yang berseteru menyetujui diadakannya gencatan senjata yang bersifat sementara (*temporary*) pada 10 Agustus 2019 yang diusulkan oleh PBB selama liburan Idul Adha. Misi PBB di Libya (UNSMIL) bertindak sebagai bertanggung jawab untuk memantau pelanggaran gencatan senjata.

Turki secara formal menyetujui permintaan bantuan GNA pada tanggal 2 Januari 2020, ketika *Grand National Assembly* yang merupakan badan legislatif Turki mengeluarkan mandat selama 1 tahun yang mengijinkan untuk dilakukannya pengerahan pasukan militer ke wilayah Libya sebagai upaya untuk membantu pemerintahan GNA dalam menghadapi rival politiknya. Posisi pemerintahan GNA yang terdesak oleh serangan militer Haftar ke Tripoli menjadi terbantu oleh datangnya bantuan militer Turki hingga mampu membalikkan keadaan, dimana sebelumnya Haftar kembali melakukan penyerangan ke kota Tripoli pada 12 Desember 2019. Pada tanggal 4 Januari 2020, LNA berhasil merebut Sirte yang merupakan kota penting dan strategis yang berada di wilayah tengah Libya, sebagai bentuk respon atas intervensi yang dilakukan oleh Turki dalam konflik tersebut. Dalam perkembangannya, dengan adanya intervensi dari militer Turki, pasukan GNA berhasil memukul mundur militer LNA hingga dapat merebut kembali seluruh wilayah barat Libya dan kota Sirte pada bulan Juni 2020 dan membuat situasi konflik di Libya kembali kedalam keadaan *Status Quo Ante Bellum[[18]](#footnote-18)*.

Perdamaian di Libya pada akhirnya berhasil tercapai pada 23 Oktober 2020, ketika kedua pihak yang berseturu setuju untuk mengadakan gencatan senjata dalam 5+5 *Joint Military Commission* yang dimediasi oleh PBB. Gencaran senjata tersebut menjadi pintu awal dilaksanakannya *Libyan Political Dialogue Forum* yang menghasilkan terbentuknya pemerintahan gabungan baru yang dinamakan *Government of National Unity* *Libya* pada 10 Maret 2021 dan menjadinya Abdul Hamid Dbeibeh sebagai Perdana Menteri Libya yang baru pada 15 Maret 2021.

Diterimanya permintaan bantuan militer secara formal pemerintahan GNA oleh Turki menjadi peristiwa yang menarik. Hal itu terkait dengan situasi di Era Presiden Erdogan saat ini, Turki mengalami transformasi orientasi politik luar negeri yang sebelumnya menganut sikap “*zero problems”* dengan negara-negara tetangganya, menjadi kearah yang semakin aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional mereka dikawasan hingga melakukan berbagai aksi “berani” yang membuat marah negara tetangganya dan terkesan menantang Rusia, Eropa dan Amerika Serikat[[19]](#footnote-19). Sebelumnya, Turki menjadikan doktrin *zero problem with neighbour* sebagai landasan utama kebijakan luar negerinya di kawasan. Doktrin tersebut merupakan gagasan Ahmet Davutoğlu, seorang profesor hubungan internasional yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri Turki. Istilah “*zero problem with neighbor*” merupakan slogan yang merangkum harapan Turki dalam hubungannya dengan negara tetangga. Turki ingin menghilangkan semua masalah dari hubungannya dengan tetangga atau setidaknya meminimalkannya sebanyak mungkin[[20]](#footnote-20).

Akan tetapi, setelah Presiden Morsi digulingkan di Mesir pada tahun 2013 dan adanya perubahan pola gerakan pemberontakan di Suriah menjadi perang saudara yang berlangsung lama dan melibatkan kekuatan regional dan ekstra-regional. Perkembangan situasi Timur Tengah tersebut dianggap menjadi ancaman baru terhadap keamanan nasional bagi elit politik Turki. Adanya serangan teroris skala besar dan gelombang besar pengungsi membuat Turki mengalami ketidakstabilan keamanan di sepanjang perbatasannya dengan Suriah dan Irak. Sebagai bentuk respon, Turki mulai terlibat langsung termasuk secara militer, dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Suriah dan Libya dan “melanggar” dokrin kebijakan luar negerinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan Libya, alasan perubahan kebijakan Turki untuk terlibat dalam konflik memiliki indikasi dikarenakan oleh adanya kepentingan Turki di Libya. Hal itu karena pada Perang Internal Libya II, Turki menjadi titik pertemuan bagi faksi-faksi Islam Libya yang terpinggirkan di Libya, karena Libya menjadi salah satu negara yang tidak berhasil “dikuasai” oleh partai islamis saat *Arab Spring* seperti di Mesir saat pemerintahan presiden Morsi. Kedekatan partai AKP dengan Ikhwanul Muslimin menjadi salah satu pendorong Turki untuk terlibat dengan upaya perlindungan faksi Ikhwanul Muslimin dalam pemerintahan GNA. Sementara itu, indikasi lainnya ialah dengan adanya aliansi bersama partai nasionalis di dalam negeri, meningkatkan penekanan pada penegasan hak kedaulatan maritim Turki, termasuk melalui implementasi kekuatan angkatan laut yang melahirkan *Blue Homeland Doctrine* yang berisikan klaim teritorial maritim Turki di laut sekitarnya, salah satunya ialah Laut Mediterania Timur*[[21]](#footnote-21)*. Hal itulah yang kemudian menjadi gerbang awal masuknya Turki ke Libya.

Ketika terjadinya eskalasi konflik dimana militer Jendral Khalifa Haftar melakukan ofensif ke wilayah GNA pada April 2019, Turki dan GNA menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang kedaulatan wilayah laut di Laut Mediterania pada 27 November 2019. Kedua pihak juga menandatangani perjanjian militer-keamanan yang beberapa isi perjanjian meliputi pelatihan militer dan kontra-terorisme, bantuan migrasi, logistik, peta dan perencanaan militer, dan transfer para ahli[[22]](#footnote-22). MoU tersebut memberikan kesempatan bagi Turki untuk dapat mengerahkan pasukan militer mereka ke Libya dan mengubah situasi konflik yang cenderung berada dalam kendali Khalifa Haftar dan LNA.

Dengan dipaparkannya uraian diatas, penulis menemukan adanya permasalahan mengenai bentuk kepentingan apakah yang ingin diraih oleh Turki sehingga mengubah sikap *zero problem with neighbors* dan ikut terlibat dalam konflik internal Libya pasca rezim Moammar Gaddafi menghadapi negara-negara kawasan lainnya. Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba mengangkat lebih jauh permasalahan diatas dengan judul:

**“KETERLIBATAN TURKI DALAM KONFLIK INTERNAL LIBYA PASCA REZIM MOAMMAR GADDAFI: PERUBAHAN PENDEKATAN *ZERO PROBLEM WITH NEIGHBORS* TURKI”**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Didasarkan kepada uraian Latar Belakang yang penulis kemukakan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa konflik internal di Libya pasca rezim Moammar Gaddafi menjadi konflik yang berkepanjangan?
2. Bagaimana pendekatan *zero problem with neighbours* Turki berubah menjadi intervensi militer di Libya?
3. Apa saja Kepentingan Nasional yang Turki bawa dalam konflik internal Libya tersebut?

**1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat akan luasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memberikan batasan permasalahan. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian mengenai perubahan pendekatan *zero problem with neighbour* Turki yang berubah menjadi intervensi militer dalam konflik internal Libya pasca rezim Moammar Gaddafi di tahun 2020.

**1.4 Perumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dengan menarik masalah dari identifikasi masalah dan pembatasan masalah dalam bentuk pertanyaan, oleh karena itu penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

***“Mengapa pendekatan zero problem with neighbour Turki berubah menjadi intervensi militer dalam konflik internal Libya pasca rezim Moammar Gaddafi?”***

**1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.5.1 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa tujuan penulisan yang meliputi hal-hal antara lain:

1. Untuk mengetahui alasan mengapa konflik internal di Libya pasca rezim Moammar Gaddafi menjadi konflik yang berkepanjangan;
2. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan *zero problem with neighbours* Turki dapat berubah;
3. Untuk mengetahui Kepentingan Nasional yang menjadi latar belakang keterlibatan Turki dalam konflik internal Libya.

**1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Selain tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pengetahuan dibidang Hubungan Internasional mengenai isu keamanan khususnya dikawasan Timur Tengah;
2. Penelitian ini dapat menjadi informasi secara tertulis maupun referensi mengenai konflik internal Libya, khususnya mengenai konflik internal pasca rezim Moammar Gaddafi dan kepentingan negara asing yakni Turki di dalam konflik tersebut;
3. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta kemampuan analisis bagi penulis terhadap fenomena–fenomena internasional yang terjadi;
4. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam jenjang studi sarjana (strata-1) Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.

1. *Nuclear Holocaust* ialah sebuah skenario teoritis yang menggambarkan bahwa peledakan massal senjata nuklir dapat menyebabkan kehancuran secara global dan penyebaran zat radioaktif ke atmosfer bumi yang berpotensi mengakibatkan hancurnya peradaban bahkan kehidupan di bumi. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kementerian Pertahanan RI. *Keputusan Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Nomor: KEP/1016/XI/2020 Tentang Bahan Pembelajaran Proxy War.* (Jakarta: Kementrian Pertahanan RI, 2020). Hal. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Why Engange in Proxy War? A State’s Perspective*. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/05/21/why-engage-in-proxy-war-a-states-perspective Diakses pada 3 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Understanding Intrastate Conflict.* https://world101.cfr.org/how-world-works-and-sometimes-doesnt/conflict/understanding-intrastate-conflict Diakses pada 16 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Libya Revolt of 2011.* https://www.britannica.com/event/Libya-Revolt-of-2011 Diakses pada 16 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-6)
7. *UN Security Council votes to end Libya operations.* https://www.bbc.com/news/world-africa-15481143 Diakses pada 16 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Muammar Gaddafi: How he died.* https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-15390980 Diakses pada 16 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Libyan elections: Low turnout marks bid to end political crisis*. https://www.bbc.com/news/world-africa-28005801 Diakses pada 17 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Libya publishes parliamentary election results*. http://www.turkishweekly.net/news/169449/-libya-publishes-parliamentary-election-results.html Diakses pada 5 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Libya faces chaos as top court rejects elected assembly.* https://www.reuters.com/article/us-libya-security-parliament-idUSKBN0IQ0YF20141106 Diakses pada 5 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Libya clashes between rival militias in Benghazi*. https://www.bbc.com/news/world-africa-27448224 Diakses pada 16 Desember 2021 [↑](#footnote-ref-12)
13. Th*e Libyan Political Agreement: Time for a Reset*. https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/libya/libyan-political-agreement-time-reset Diakses pada 5 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-13)
14. *The Palermo conference on Libya: A diplomatic test for Italy’s new government.* https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/11/19/the-palermo-conference-on-libya-a-diplomatic-test-for-italys-new-government/ Diakses pada 6 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. *The failure of the Palermo Conference on Libya.* https://moderndiplomacy.eu/2018/11/21/the-failure-of-the-palermo-conference-on-libya/ Diakses pada 6 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Timeline: Haftar’s months-long offensive to seize Tripoli*. https://www.aljazeera.com/news/2020/2/19/timeline-haftars-months-long-offensive-to-seize-tripoli Diakses pada 5 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Libya makes formal request for Turkish military support, official says*. https://www.trtworld.com/turkey/libya-makes-formal-request-for-turkish-military-support-official-says-32499 Diakses pada 5 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Status Quo Ante Bellum* adalah sebuah frasa bahasa Latin yang berarti "keadaan sebagaimana adanya sebelum perang" [↑](#footnote-ref-18)
19. *How Turkey Militarized its Foreign Policy*. https://www.politico.eu/article/how-turkey-militarized-foreign-policy-azerbaijan-diplomacy/ Diakses pada 18 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Policy of Zero Problems with our Neighbors.* https://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-with-our-neighbors.en.mfa. Diakses pada 18 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-20)
21. *From the “Zero Problems With Neighbours” doctrine to an aggressive foreign policy posture: a paradigm shift in Turkey’s regional strategy.* https://securitypraxis.eu/turkey-shift-regional-strategy-2/ Diakses pada 28 Februari 2022 [↑](#footnote-ref-21)
22. Arab Center for Research & Political Studies. *Turkey’s Growing Role in Libya: Motives, Background and Responses*. Situation Assessement (15 Januari, 2020). Hal. 2 [↑](#footnote-ref-22)